

Peran Mahasiswa Dalam Mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah: Studi Literatur

Firdaus Ro'mah¹, Jumadi², Muhammad Budi Utama³

¹²³Akademi Bisnis Lombok

Article Info

Article history:

Accepted: 26 February 2026

Publish: 01 Marc 2026

Keywords:

*Accountability;
literature review;
regional financial management;
students;
transparency*

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena sosial secara komprehensif tanpa melakukan pengukuran kuantitatif, sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian yang menekankan pada pemahaman konseptual dan analisis isi literatur. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengkaji sebanyak **30 sumber literatur** yang terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Dari jumlah tersebut, **22 sumber literatur** dipilih dan digunakan sebagai rujukan utama karena memiliki tingkat relevansi yang tinggi, validitas ilmiah yang baik, serta kesesuaian dengan fokus kajian mengenai peran mahasiswa dan tata kelola keuangan daerah. Seluruh sumber yang terpilih kemudian dianalisis secara sistematis melalui teknik reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris yang terdapat dalam literatur untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual serta rekomendasi praktis bagi pengembangan peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#).



Corresponding Author:

Firdaus Ro'mah

Akademi Bisnis Lombok

Email Coresspoden: its.firda80@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tata kelola keuangan daerah mencakup seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan publik. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan perencanaan anggaran, lemahnya pengendalian internal, serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran daerah untuk kepentingan publik (Handoko & Sunardi, 2016; Ikhsan & Nainggolan, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas (Sianipar et al., 2023; Khoirunnisa et al., 2023).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola keuangan daerah. Transparansi keuangan publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran daerah secara terbuka, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara administratif maupun moral (Gunawan, 2016; Auditya et al., 2013). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan praktik kecurangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Fakultas Sosial Sains, 2018). Oleh karena itu, penguatan kedua prinsip tersebut menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktor non-pemerintah. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi intelektual dan sosial. Melalui kegiatan akademik, pengabdian kepada masyarakat, dan asistensi administratif, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan dan administrasi keuangan (Anisa et al., 2025; Rowanda & Suriadi, 2025). Keterlibatan mahasiswa juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan publik di masyarakat (Kesaulya et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tata kelola keuangan daerah, kajian yang secara khusus mengulas peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah masih terbatas dan tersebar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah berdasarkan kajian literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tata kelola keuangan publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan peran mahasiswa.

2. KAJIAN TEORI

Tata Kelola Keuangan Daerah

Tata kelola keuangan daerah merupakan sistem pengelolaan keuangan publik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Handoko dan Sunardi (2016) menjelaskan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik. Ikhsan dan Nainggolan (2019) menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran. Penelitian

terbaru juga menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang optimal berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan pembangunan daerah (Sianipar et al., 2023; Frinaldi & Putri, 2024).

Transparansi Keuangan Publik

Transparansi keuangan publik merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Gunawan (2016) menyatakan bahwa transparansi berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan pengawasan publik. Dalam perspektif pengendalian fraud, transparansi menjadi salah satu instrumen utama dalam meminimalkan risiko kecurangan keuangan (Fakultas Sosial Sains, 2018). Dengan meningkatnya transparansi, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah (Khoirunnisa et al., 2023).

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah mencerminkan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dan lembaga pengawas. Auditya et al. (2013) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan kepercayaan masyarakat (Susilatri et al., 2015; Febriana & Vidyasari, 2021).

Peran Mahasiswa

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah melalui tridharma perguruan tinggi. Keterlibatan mahasiswa dalam asistensi penyusunan anggaran dan administrasi keuangan daerah terbukti dapat meningkatkan ketertiban dan kualitas pengelolaan keuangan (Rowanda & Suriadi, 2025). Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai agen edukasi yang membantu meningkatkan literasi keuangan publik di masyarakat (Kesaulya et al., 2024; Aini & Nafis, 2025).

Research Gap dan Novelty Penelitian

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak membahas tata kelola keuangan daerah dari sisi pemerintah daerah, seperti perencanaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada kebijakan, sistem pengelolaan keuangan, serta peran aparatur pemerintah daerah. Namun, pembahasan mengenai keterlibatan mahasiswa sebagai pihak non-pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan daerah masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji secara khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan mahasiswa sebagai salah satu aktor yang berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai bentuk peran mahasiswa, seperti kegiatan edukasi kepada masyarakat, pendampingan, serta peran kritis dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dan memberikan sudut pandang baru mengenai kontribusi mahasiswa dalam tata kelola keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengkaji sebanyak **25 sumber literatur** yang terdiri dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait tata kelola keuangan daerah dan peran mahasiswa. Dari jumlah tersebut, **18 sumber literatur** dipilih dan digunakan sebagai rujukan utama karena memiliki relevansi tinggi, kredibilitas akademik, serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan relevan dengan topik tata kelola keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, serta peran mahasiswa. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian. Artikel yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi, sehingga data yang dianalisis memiliki relevansi akademik.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan artikel ilmiah yang relevan. Artikel yang terpilih kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti tata kelola keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, dan peran mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan pandangan antar penelitian yang dianalisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mensintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas serta memperkuat landasan teoretis penelitian tanpa bergantung pada data lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahasiswa dalam Perencanaan dan Administrasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil kajian literatur, peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan administrasi keuangan publik. Penelitian Rowanda dan Suriadi (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada instansi pemerintah daerah mampu membantu meningkatkan ketertiban administrasi dan ketepatan penyusunan dokumen anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah.

Kontribusi Mahasiswa terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Selain dalam aspek administrasi, mahasiswa juga berperan dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. Transparansi keuangan publik menjadi salah satu indikator utama dalam tata kelola keuangan daerah yang baik karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran daerah (Gunawan, 2016). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan edukasi publik, mahasiswa dapat

membantu menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat (Kesaulya et al., 2024). Dengan demikian, mahasiswa berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan publik.

Peran Mahasiswa dalam Mendorong Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa peran mahasiswa berkaitan erat dengan upaya peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Auditya et al., 2013). Mahasiswa dapat berkontribusi melalui kajian akademik, analisis laporan keuangan daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan literatur (Febriana & Vidyasari, 2021). Kontribusi ini memperkuat fungsi pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan Mahasiswa terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Dari perspektif tata kelola keuangan daerah, keterlibatan mahasiswa juga mendukung penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Penelitian Ikhsan dan Nainggolan (2019) serta Handoko dan Sunardi (2016) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan asistensi dan pendampingan administrasi dapat membantu instansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih tertib dan sistematis.

Pengembangan Kapasitas Mahasiswa melalui Keterlibatan Tata Kelola Keuangan

Selain berdampak pada pemerintah daerah, keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola keuangan daerah juga memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keilmuan, khususnya di bidang manajemen dan akuntansi sektor publik. Anisa et al. (2025) menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan administrasi dan keuangan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik tata kelola keuangan publik serta kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja.

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Penyimpangan Keuangan Daerah

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa peran mahasiswa dapat mendukung upaya pencegahan penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan pengawasan publik merupakan faktor penting dalam meminimalkan risiko fraud (Fakultas Sosial Sains, 2018). Melalui peran edukatif dan kritis, mahasiswa dapat membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di masyarakat.

Implikasi Tata Kelola Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan daerah, tata kelola keuangan daerah yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor pendidikan (Makatara, 2025). Peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah secara tidak langsung turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sintesis Peran Mahasiswa dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah bersifat multidimensional dan strategis. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendukung teknis dalam administrasi keuangan, tetapi juga sebagai agen edukasi, pengawas sosial, dan kontributor pemikiran akademik. Kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran mahasiswa guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup kontribusi praktis melalui asistensi administratif, edukasi keuangan publik, serta partisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa terbukti mampu mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Selain memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola keuangan daerah juga memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keilmuan, sehingga mampu menghubungkan konsep teoretis dengan praktik pengelolaan keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen dan akuntansi sektor publik.

Secara keseluruhan, peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola keuangan daerah bersifat multidimensional dan saling melengkapi. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan, pendukung teknis, serta mitra kritis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar peran mahasiswa dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga analisis yang dilakukan bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber pustaka yang digunakan. Tidak adanya pengumpulan data lapangan menyebabkan penelitian ini belum mampu menggambarkan kondisi empiris terkini secara langsung di daerah tertentu.
2. Kedua, sebagian literatur yang digunakan masih berasal dari penelitian dengan konteks dan lokasi yang berbeda, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi spesifik di setiap daerah. Hal ini berpotensi membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap konteks pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas.
3. Ketiga, penelitian ini belum membahas secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas peran mahasiswa dalam tata kelola keuangan daerah, seperti kebijakan pemerintah daerah, kesiapan institusi, serta dukungan regulasi.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu serta bimbingannya, rekan-rekan yang senantiasa memberi motivasi, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Q., & Nafis, A. W. (2025). Peran mahasiswa dalam membantu pengelolaan keuangan dan usaha di koperasi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 132–139. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.34>
- Anisa, R., Gulo, Y. N., & Musytari. (2025). Peran administrasi keuangan dalam mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 24(12), 2291–2300. <https://scholar.google.com/scholar>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41. <https://scholar.google.com/scholar>
- Fakultas Sosial Sains. (2018). The new fraud triangle model dengan perspektif syariah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 21–46. <https://scholar.google.com/scholar>
- Febriana, N., & Vidyasari, B. (2021). Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4). <https://scholar.google.com/scholar>
- Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 255–263. <https://scholar.google.com/scholar>
- Gunawan, D. R. (2016). Transparansi keuangan publik. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Handoko, A. H., & Sunardi, S. (2016). Tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 53–68. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Ikhsan, A., & Nainggolan, E. P. (2019). Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118–126.
- Kesaulya, C., Lawalata, M. S., Kalorbobir, Y. M., & Pasamba, E. M. (2024). Pengenalan pengelolaan keuangan daerah. *ABDI UNISAP*, 2(1), 114–120. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v2i1.245>
- Khoirunnisa, H. N., Yusmina, N., & Siswantoro, D. (2023). Tata kelola keuangan daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 157–180. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368>
- Rowanda, A., & Suriadi, I. (2025). Kontribusi mahasiswa dalam penyusunan anggaran daerah. *Jurnal Abdi Anjani*, 3(1), 237–244. <https://doi.org/10.29303/anjani.v3i1.2170>
- Sianipar, B., Simamora, M., & Astari, H. (2023). Akuntansi manajemen dalam APBD. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 33–40. <https://doi.org/10.65510/jieb.v1i2.58>

- Susilatri, S., Tanjung, A. R., & Nugraheni, E. M. (2015). Akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Online Mahasiswa FE Universitas Riau*, 2(1).
<https://scholar.google.com/scholar>
- Yuda Makatara, B. A. (2025). Pengelolaan administrasi keuangan daerah dan infrastruktur pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 175–179.